

DAFTAR PUSTAKA

- Adhiantoko, Hony. 2013. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora Tahun 2007-2011)*. Skripsi. Sarjana Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. (Tidak dipublikasikan).
- Adzani, H.A., dan Dwi Martani. 2014. *Pengaruh Kesejahteraan Masyarakat, Faktor Politik Dan Ketidapatuhan Regulasi Terhadap Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Simposium Nasional Akuntansi XVII. Lombok.
- Anastasia, M.A. 2012. *Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba*. Skripsi. Sarjana Ekonomi Universitas Hasanuddin Makasar. (Tidak dipublikasikan).
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2012. *Presentasi Penjelasan Teknis EKPPD Tahun 2012*. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Banyumas. 2011. *Kabupaten Banyumas Dalam Angka 2011*. Banyumas.
- , 2012. *Kabupaten Banyumas Dalam Angka 2012*. Banyumas.
- , 2013. *Kabupaten Banyumas Dalam Angka 2013*. Banyumas.
- , 2014. *Kabupaten Banyumas Dalam Angka 2014*. Banyumas.
- , 2015. *Kabupaten Banyumas Dalam Angka 2015*. Banyumas.
- , 2016. *Kabupaten Banyumas Dalam Angka 2016*. Banyumas.
- Badan Pusat Statistik Jawa Tengah. 2011. *Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota Jawa Tengah 2009-2010*. Semarang.
- , 2012. *Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota Jawa Tengah 2011*. Semarang.
- , 2013. *Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota Jawa Tengah 2012*. Semarang.
- , 2014. *Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota Jawa Tengah 2013*. Semarang.
- , 2015. *Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota Jawa Tengah 2014*. Semarang.
- , 2016. *Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota Jawa Tengah 2015*. Semarang.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Erlangga. Jakarta.

- Detisa, Dora. 2009. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Era Otonomi Khusus pada Pemerintah Nangroe Aceh Darussalam*. Skripsi. Sarjana Ekonomi Universitas Sumatera Utara Medan. (Tidak dipublikasikan).
- Fahmi, Irham. 2011. *Analisis Kinerja Keuangan*. Alfabeta. Bandung.
- Goo, Melince. dkk. 2016. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dogiyai Provinsi Papua*. Jurnal Buletin Sariputra Vol. 6 Nomor 1.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi keuangan daerah, Edisi Revisi*. Salemba Empat. Jakarta.
- Halim, Abdul. dan Yanuar, E.R. dkk. 2010. *Sistem Akuntansi Sektor Publik. Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat – Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah – Kapita Selekt Sistem Akuntansi Sektor Publik*. UPP STIM YPKN. Yogyakarta.
- Indrawan, D.P. 2013. *Analisis Kinerja Keuangan Berdasarkan Metode Vertikal-Horizontal dan Rasio Keuangan pada PLN (Persero) Pusat Periode 2008-2012*. Skripsi. Sarjana Ekonomi Universitas Hasanuddin Makasar. (Tidak dipublikasikan).
- , 2016. *Manual Tata Cara EKPPD Tahun 2016*. Jakarta.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. 2010. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat. Jakarta.
- , 2005. *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat. Jakarta.
- Mahmudi. 2003. *New Public Management (NPM): Pendekatan Baru Manajemen Sektor Publik*. Sinergi Kajian Bisnis dan Manajemen. Vol. 6, No. 1, hal. 69-76.
- Mahmudi. 2007. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah : Good Governance, Democratization, Local Government Financial Management, Edisi Bahasa Indonesia*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
- Mulyadi. 2005. *Akuntansi Biaya, Edisi kelima, Cetakan ketujuh*. Akademi Manajemen Perusahaan YKPN. Yogyakarta.
- Nawawi, Hadari. 2003. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. UGM Press. Yogyakarta.
- Nurlaila, 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia I*. Penerbit LepKhair.
- Pratama, A.N. 2013. *Analisis Kinerja Keuangan dan Evaluasi Anggaran Pemerintah Daerah Pada Masa Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Provinsi DKI Jakarta)*. Skripsi. Sarjana Ekonomi Institut

Pertanian Bogor. (Tidak dipublikasikan).

- Puspawati, A.A. 2016. Penerapan *New Public Management* (NPM) di Indonesia (Reformasi Birokrasi, Desentralisasi, Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam Meningkatkan Pelayanan Publik). *Publisia (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, Vol. 20. No. 1, hal. 47-64.
- Puspita, Rora dan Dwi Martani. 2012. *Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Sukarela Pada Website Pemda Tahun 2010*. Paper dipresentasikan dalam Simposium Nasional Akuntansi 15, Balikpapan, 20-21 September 2012.
- Renyowijoyo, M. 2008. *Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Non Laba*. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. *Tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta.
- . 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. *Tentang Standar Akuntansi Pemerintah*. Jakarta.
- . 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
- . 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
- . 2007. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007. *Tentang Organisasi Perangkat Daerah*. Jakarta.
- . 2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007. *Tentang Petunjuk Teknis Penataan 41 Organisasi Perangkat Daerah*. Jakarta.
- . 2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. *Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
- . 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. *Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta.
- . 2008. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2008. *Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas*. Banyumas.
- . 2009. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. *Tentang Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta.
- . 2009. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009. *Tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta.
- . 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. *Tentang Standar Akuntansi Pemerintah*. Jakarta.

- , 2011. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011. *Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta.
- , 2011. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. *Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
- , 2011. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 44 Tahun 2011. *Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi DPPKAD Kabupaten Banyumas*. Banyumas.
- , 2013. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013. *Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual; pada Pemerintah Daerah*, Jakarta.
- Sijabat, M.Y. dkk. 2013. *Analisis Kinerja Keuangan Serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi pada Dispenda dan BPKAD Kota Malang TA 2008-2012)*. Jurnal Universitas Brawijaya. Malang.
- Sistiana, Mega dan Makmur Hadi. 2014. *Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah Kabupaten/Kota*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Vol. 12 Nomor 4, Januari 2014 : 277-289.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta. Bandung.
- Sukirman, Dkk. 2008. *Kinerja dan Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis dan Tasikmalaya Tahun 2005-2007*. Jurnal Ekonomi Regional, Vol. 3 Nomor 1.
- Sulianti, dan Siti Rochmah Ika. 2012. *Perbandingan Kinerja Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah*. Jurnal Bisnis dan Ekonomi EFEKTIF, Vol. 3 Nomor 2.